

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
TAHUN ANGGARAN 2015-2019**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

AFNI NURVITA SARI

2018/18133005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

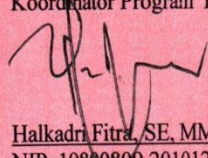
**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
TAHUN ANGGARAN 2015-2019**

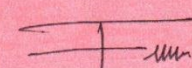
Nama : Afni Nurvita Sari  
NIM : 18133005  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 Juli 2021

Diketahui Oleh  
Koordinator Program DIII Akuntansi

  
Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA.  
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh  
Pembimbing

  
Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN  
ANGGARAN 2015-2019**

Nama : AFNI NURVITA SARI  
NIM / BP : 18133005 / 2018  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Fakutas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi  
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 5 Agustus 2021

**Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak	(Ketua)
2. Vita Fitria Sari, SE., M.Si.	(Anggota)
3. Fiola Finomia Honesty, SE., M.Si	(Anggota)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afni Nurvita Sari  
Tahun Masuk/NIM : 2018/18133005  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/ 08 April 1999  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jorong Palembang Tengah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam  
Tahun Anggaran 2015-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Afni Nurvita Sari  
NIM. 18133005

## **ABSTRAK**

Afni Nurvita Sari : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam  
Tahun Anggaran 2015-2019

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah , dan (5) Rasio Keserasian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Agam jika dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan sangat kurang dikarenakan rata-rata rasionya masih berada di interval 1,00%-10,00% (2) Rasio Kemandirian keuangan daerah masih tergolong pola hubungan instruktif karena berada pada interval 0%-25% (3) Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya masih kurang dari 100% (4) Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai kurang efisien karena masih berada pada interval 90%-100% (5) Rasio Keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio dari belanja modal menjadi relatif kecil.

**Kata Kunci:** Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019”** dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu keberhasilan penyusunan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA. Selaku Ketua Program Studi jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk Mama, Papa, dan juga saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan dukungan, nasihat, dan do'a kepada penulis.
5. Dan semua teman-teman seperjuangan khususnya D3 Akuntansi 2018 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan

tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempatan tugas akhir ini. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 28 Juli 2021

Afni Nurvita Sari

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kinerja Keuangan Daerah	8
1. Keuangan Daerah	8
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	8
6. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	15
7. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18
B. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah	19
BAB III	27
PENDEKATAN PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Definisi Operasional	27
BAB IV	35
PEMBAHASAN	35
A. Sejarah Singkat Kabupaten Agam	35
B. Temuan dan Pembahasan	38
BAB V	58

KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	x

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	20
Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	22
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	24
Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	31
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	38
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	42
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	45
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	49
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	39
Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	43
Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	46
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019	50
Gambar 4.5 Grafik Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Operasi)	50
Gambar 4.6 Grafik Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019 (Belanja Modal)	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam 2015

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam 2016

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam 2017

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam 2018

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam 2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemerintahan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengontrol roda pemerintahan di daerah. Umumnya lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat. Tujuan dari lembaga pemerintahan adalah untuk menyediakan layanan serta kemampuan untuk meningkatkan pelayanan tersebut pada masa yang akan datang. Dalam mencapai tujuan ini biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan, meningkatkan mutu pendidikan, dan mutu kesehatan .

Pada era reformasi ini banyak terjadi perubahan baik itu dibidang ekonomi, sosial maupun politik, yang berdampak kepada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Dan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar hal ini berarti daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti apabila kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah alat pengendali dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Dilihat dari Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak yang belum memahami dan bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Ini merupakan hal yang wajar karena tidak semua yang berkepentingan memiliki latar belakang akuntansi. Untuk menganalisis

laporan keuangan dapat menggunakan metode-metode dan salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasi laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu. Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim 2008:230): (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam

stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Penulis memilih Kabupaten Agam yang akan diteliti kinerja keuangannya karena kabupaten Agam merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang sedang menjalankan otonomi daerah. Selaku pemerintah daerah di Indonesia yang melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten agam dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pemerintah yaitu melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten Agam harus memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada setiap periode.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Agam adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Agam dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2015-2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Kemandirian?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Efektivitas PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Keserasian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Kemandirian.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Efektivitas PAD.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam tahun 2015-2019 jika dilihat menggunakan Rasio Keserasian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca penelitian ini.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, serta rasio

efisiensi keuangan daerah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Agam.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam dengan menggunakan beberapa rasio. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau dikemukakan, antara lain:

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam masih dinilai sangat kurang jika dilihat menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio yang masih berada di interval 1,00%-10,00%.
3. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam masih tergolong sangat rendah jika dilihat dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan rata-rata yang masih berada di interval 0,00% - 25,00%.
4. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam dapat dikategorikan belum efektif jika dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas PAD. Hal ini dikarenakan rata-rata efektivitasnya kurang dari 100%.
5. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai kurang efisien. Hal ini diketahui berdasarkan rata-rata efisiensi keuangan daerah kabupaten Agam dari

tahun 2015-2019 sebesar 90,2%. Karena masih berada di interval 90,00%-100,00% maka dikategorikan masih kurang efisien.

6. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Agam Jika dilihat dari rasio keserasian masih dinilai belum stabil dari tahun ke tahun. Pengeluaran belanja operasi masih cenderung lebih besar dari belanja modal.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Agam sebaiknya mengukur kinerja keuangannya secara kontinyu agar dapat mengontrol dan mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerahnya dari tahun ke tahun agar tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, jujur, dan akuntabel.
2. Pemerintah kabupaten Agam diharapkan untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu pemerintah kabupaten Agam seharusnya dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pusat dan provinsi, misalnya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi dan pajak daerah.
3. Dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kemandirian, sebaiknya pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang notabene adalah sumber-sumber yang memiliki andil besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PAD di pemerintahan.

4. Pemerintah daerah kabupaten Agam sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja pembangunan sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
5. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat yaitu kabupaten Agam. Diharapkan di penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, (2004). *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) (Akses tgl 3 Mei 2021)
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetya, Gede Edy. 2006. *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang no 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Sanusi, Anwar. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.